Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah

MENARA *Ilmu*

DAFTAR ISI

☐ Pengaruh Pemberian Dosis Pupuk Kotoran Ayam Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai oleh Ansoruddin	1
☐ Pengaruh Konsentrasi Pupuk Cair Super Bionik Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Cabai Oleh Jamilah	11
☐ Beberapa Alternatif Tanaman Pertanian pada Tanah Gambut di Indonesia oleh Lokot Ridwan	19
☐ Implikasi Peguasaan Lahan Komunal pada Pohon dalam sistem Agroforestri : Studi Kasus di Sumatera Barat oleh Tri Martial	27
☐ Pengaruh Perbedaan Persentase Bagian Partikel Kayu Untuk Lapisan Permukaan Papan Partikel dari Serat Tandan Kosong Sawit (TKS) Terhadap Sifat Fisis dan Mekanis oleh Susilastri dan Baroroh Wista Anggraeni	35
☐ Respon Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kedelai (<i>Glycine max</i> L. Merrill) Akibat Penggunaan Pupuk Super Bionik dan Mulsa Oleh Savitri	42
☐ Sejarah dan Corak Kebudayaan di Indonesia oleh Bambowo Laiya	53
☐ Peranan Budgetting dalam Suatu Perusahaan oleh Nisfu Fhitri	61
☐ Compenents of Communicative, Compenents in English oleh Sitasi Zagoto	70
☐ Pedagogical Content Knowledge (PCK) Melalui Peran Guru dalam Antisipasi Didaktis dan Pedagogis (ADP) Menuju Matematika Abstrak oleh Kms. Muhammad Amin Fauzi dan Firmansyah	79
☐ Kontribusi Pupuk Organik dan Anorganik pada Beberapa Varietas Kacang Hijau (<i>Phaseolus Radiatus</i>) oleh Wan Arfiani Barus	91

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**

MENARA Ilmu

Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB)

Pelindung

Dr. H. Shofwan Karim Elha, MA (Rektor)

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi

Ir. Hariadi, M.Eng

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSB

Dewan Redaksi/Penyunting Pelaksana

Dr. Desyanti, M.Si

Dr. Marganof, M.Pd

Ir. Yusnaweti, M.P

Ir. Trisna Putra, MT

Drs. Zulmardi, M.Si

Wedy Nasrul, SE, M.Si

Drs. Mursal, M.Ag

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Chatlinas Said

Prof. Dr. Anwar Kasim

Dr. H. Shofwan Karim Elha, MA

Dr. Ansofino, M.Si

Drs. Mafardi, M.Pd

Pelaksana Tata Usaha & Bendahara

Susilastri, S.Hut

Alamat Redaksi

Kantor LPPM UMSB Jl. Pasir Kandang 4, Padang 25172

Telp. (0752) 481645 Email : umsb@telkom.net

MENARA ILMU, merupakan Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah yang diterbitkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang terbit 2 (dua) kali dalam setahun. Penyunting menerima kiriman naskah hasil kajian dan penelitian untuk bidang eksakta, pendidikan/sosial dan agama islam untuk dipublikasikan di jurnal ini. Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud. Syarat-syarat dan cara penulisan tulisan dapat dilihat pada halaman belakang.

IMPLIKASI PENGUASAAN LAHAN KOMUNAL PADA POHON DALAM SISTEM AGROFORESTRI: STUDI KASUS DI SUMATERA BARAT

Oleh

TRI MARTIAL

Staf Pengajar F.Pertanian UISU Jl. Karya Bhakti, Medan, Sumatera Utara,
Email: tri_martial@yahoo.com.

Abstract

Agroforestry as a model of community-based forest management generally does not develop and is mostly in the form of traditional management. In West Sumatra, sustainability relates to the status of land tenure as communal property (communal land). Communal interests that appear on the communal rights to land and trees are able to direct the management of agroforestry to be sustained. Lack of security of land tenure does not affect the appearance of agroforestry, but the level of management or management of land use is more important for the purpose.

Key words: agroforestry, land tenure, tree tenure, management, sustainable.

PENDAHULUAN

Kebijakan pengelolaan hutan selama menjadikan hutan sebagai sumber devisa. Akibatnya ekstraksi hutan lebih dipentingkan oleh perusahaan-perusahaan besar pemerintah atau swasta. Sedang pengelolaan tradisional oleh masyarakat hutan terpinggirkan dan dianggap sebagai agen perusak hutan. Sehingga sering menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah dan pemegang hak pengusahaan hutan.

Konflik pengelolaan hutan terutama bersumber kepada persepsi ketidakadilan oleh masyarakat sekitar hutan dimana akses mereka terhadap sumber daya hutan dan lahan dilarang. Hak-hak masyarakat lokal berbasis pada *property right* (hak kepemilikan) sebagai institusi dalam sistem aturan (*role in use*). Di Indonesia *property right* berada dalam pengaturan yang sering tumpang tindih dalam aturan formal dan informal. Kepemilikan lahan sebagai bentuk *property right* merupakan permasalahan yang kompleks. Umumnya tanah-tanah tidak memiliki kejelasan status, sebab negara selain mengakui hak-hak kepemilikan sesuai dengan UUPA 1960 juga mengakui keberadaan hak *ulayat* (kepemilikan melalui lembaga adat). Akibatnya status penguasaan lahan juga beragam yang cenderung berubah.

Agroforestri sebagai salah satu model pemanfaatan lahan lestari, di Sumatera Barat umumnya ditemui pada lahan-lahan masyarakat khususnya pada lahan kering dalam bentuk ladang atau kebun. Agroforestri banyak dipromosikan sebagai sistem *land use* yang tepat untuk mengatasi masalah kerusakan hutan dengan melakukan penanaman pohon pada lahan pertanian, serta mampu meningkatkan pendapatan petani dan akhirnya mengurangi intensitas tekanan pada hutan (Segura-Bonilla, 1997; Unruh, 2001; Place dan Otsuka, 1997; Dias, 2003).

Secara teoritis keberlanjutan agroforestri ini dipengaruhi oleh status hak-hak penguasaan pada lahan, dimana jika diprediksi aman dalam penguasaan lahan dan produk di atasnya, maka investasi ke lahan diharapkan optimal. Namun bagaimana hubungan antara penguasaan lahan komunal dengan penguasaan pohon penting dikaji dalam mendukung keberlanjutan sistem agroforestri.

AREAL STUDI DAN METODOLOGI

Penelitian dilakukan di Sumatera Barat. Lokasi penelitian adalah areal *parak* yang merupakan integrasi pohon dan tanaman pertanian. Areal dipilih secara *purposive*, dengan kategori terdapat pola pemanfaatan lahan dengan sistem agroforestri atau '*parak*' yang didominasi oleh tanaman tahunan atau pohon dalam suatu bentang lahan.

Tiga nagari dipilih yaitu: 1. Nagari Paninggahan, terletak di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Tanaman yang menempati porsi tertinggi adalah kopi robusta, kelapa, cengkeh, kemiri, kasiavera dan coklat. 2. Nagari Koto Malintang, terletak di kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. *Parak* yang berada di sebelah atas desa berupa campuran vegetasi yang didominasi durian dan kasiavera, serta tanaman tahunan lainnya dalam suatu bentang lahan yang kompak. 3. Nagari Paru, terletak di Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. *Parak* merupakan kebun-kebun penduduk yang didominasi oleh karet dan kasiavera dalam hamparan yang luas mengelilingi Nagari Paru.

Observasi dilakukan dengan menilai dan menggambarkan pola-pola kelembagaan lahan (*land tenure*) pada lahan komunal dan dinamika yang terjadi pada variabel kelembagaan lahan yaitu kepemilikan, akses atau pemanfaatan, dan manajemen atau kontrol pada lahan. Pendekatan ini mengacu kepada '*Rapid appraisal*

social forestry for land and tree tenure dalam menentukan *land* dan *tree tenure* (FAO, 2000).

Data primer didapat dari wawancara dan kuesioner dengan petani responden, serta wawancara mendalam dengan informan kunci yaitu walinagari, ketua-ketua adat, dan ketua organisasi, sedang data sekunder berupa gambaran fisik wilayah setempat dari instansi terkait. Data meliputi keragaan *land tenure*, praktek-praktek penggunaan lahan pada agroforestri, karakteristik sosial ekonomi dan demografi rumah tangga petani, struktur dan peranan organisasi lokal.

Analisis Deskriptif untuk membangun eksplanasi terhadap keragaan dan dinamika penguasaan lahan yang meliputi kepemilikan (*ownerships*), pemanfaatan/akses (*use/access*) dan manajemen/ kontrol (*management/control*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguasaan Lahan (*land tenure*) di Sumatera Barat

Karakteristik penguasaan lahan di tiga Nagari Paru, Koto Malintang dan Paninggahan pada kategori lahan *ulayat* kaum/suku dan *ulayat* nagari tampak pada Tabel 1 dan 2.

Tabel 1. Sistem Penguasaan lahan pada *ulayat* kaum di tiga nagari

Nagari	Pemilikan/ <i>Ownership</i>	Akses/ Pemanfaatan	Kontrol
Paru	▪ Kaum/ suku	▪ Pemegang hak atas lahan yang ditunjuk	▪ Pemegang hak lahan ▪ <i>Mamak</i> rumah
Koto Malintang	▪ Kaum/suku	▪ Pemegang hak lahan yang ditunjuk	▪ Pemegang hak lahan ▪ <i>Mamak</i> rumah
Paninggahan	▪ Kaum/suku	▪ Pemegang hak lahan yang ditunjuk	▪ Pemegang hak lahan ▪ <i>Mamak</i> rumah

Pada *ulayat* kaum di Nagari Paru, bentuk pemilikan lahan ini dimiliki secara komunal dalam kaum dan suku, merupakan sebagian besar bentuk kepemilikan lahan sebagai *pusako* tinggi. Lahan diberikan oleh pimpinan suku/kaum kepada kemenakan untuk dikelola dalam bentuk kebun. Kepemilikan lahan sebagai milik kaum, dimana lahan tidak dapat dimiliki secara perorangan. Lahan didapatkan berdasarkan warisan kepada anak perempuan. Sedangkan hak akses pada lahan juga didapatkan oleh pemegang hak/pemilik yang telah ditunjuk oleh *mamak* kepala waris untuk mengolah lahan tersebut. Kontrol pada lahan *ulayat* kaum dilakukan oleh pemilik sebagai

pemegang hak pengelolaan lahan. Dimana lahan sepanjang tetap diusahakan oleh pemegang hak milik maka dapat terus dimanfaatkan. Pemanfaatan lahan umumnya digunakan sebagai kebun campur berupa agroforestri dengan basis tanaman utama karet. Selain itu juga ditanam berbagai jenis tanaman lain seperti kasiapera, sawit, pinang, meranti, surian dan berbagai jenis tanaman pohon buah seperti mangga, sawo, melinjo, durian, rambutan dan lain sebagainya.

Di Koto Malintang, kepemilikan lahan *ulayat* kaum/ suku berada pada kaum/ suku sehingga pemilikan Lahan dimiliki secara komunal dalam kaum/ suku dan lahan tidak dapat dimiliki secara pribadi, dimana pengelola memperoleh hak pemanfaatan pada lahan setelah diberikan oleh *Mamak*. Lahan tidak dapat dijual atau digadaikan kepada pihak lain kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa.

Kepemilikan lahan warisan juga didapatkan dari garis keturunan pihak ibu (matrilineal), untuk ditanami dengan tanaman multiguna dan tidak boleh dikosongkan. Penggunaan lahan umumnya berbentuk *parak* merupakan campuran tanaman pohon dan tanaman tahunan (*agroforest*).

Kontrol lahan secara umum dilakukan oleh pemegang lahan, dimana ia dengan hak yang dimilikinya selain berupa pemanfaatan lahan juga hak untuk mengeluarkan pengguna lain pada lahan yang dipegangnya. Dengan kata lain walaupun kepemilikan lahan sebenarnya berada pada level kaum, tetapi hak memegang lahan tersebut memberi keleluasaan untuk memanfaatkan lahan sesuai dengan keinginannya.

Di Paninggahan pada *ulayat* kaum/ suku, kepemilikan lahan berada pada kaum/ suku, sedangkan hak pemanfaatan diberikan kepada anggota kaum/ suku tersebut yang telah ditunjuk oleh *mamak tungganai*. Kepemilikan lahan diatur melalui ketentuan yang disepakati di dalam KAN. Tanah *ulayat* suku/ kaum merupakan tanggung jawab seluruh *Datuk* yang berkoordinasi dengan *Datuk* Pucuk. Pada prinsipnya lahan tidak dapat dipindahtangankan. Tanah hanya dapat diwariskan.

Penggunaan lahan umumnya berbentuk kebun campuran tanaman pohon dan tanaman tahunan (*agroforest*). Penanaman kebun merupakan inisiatif dari luar bekerjasama dengan pemerintahan lokal sebagai proyek penanaman pada lahan kritis. Lahan dapat dipergunakan oleh anggota kaum/ suku yang ditunjuk oleh *mamak tungganai*. Kontrol oleh pemegang hak atas lahan, dimana ia berhak mengeluarkan pengguna lain dari lahannya sebagai konsekwensi hak pakai yang telah diberikan.

Tabel 2. Sistem Penguasaan lahan pada *ulayat* nagari di tiga nagari

Nagari	Pemilikan/ <i>Ownership</i>	Akses/ Pemanfaatan	Kontrol
Paru	▪ Nagari	▪ Nagari	▪ Warga nagari
Koto Malintang	▪ Nagari	▪ Nagari ▪ Warga Nagari yang mendapat hak pengelolaan	▪ Nagari ▪ Warga Nagari yang mendapat hak pengelolaan
Panningahan	▪ Nagari	▪ Warga Nagari yang mendapat hak pengelolaan	▪ Warga Nagari ▪ Nagari/ KAN

Pada lahan *ulayat* nagari di Paru merupakan pemilikan nagari. Lahan sebelumnya adalah merupakan lahan *ulayat* suku yang disepakati sebagai *rimbo larangan*. Lahan ini adalah milik beberapa suku, mayoritas suku Patopang dan Melayu, dan untuk kepentingan bersama disepakati sebagai pemilikan nagari. Lahan merupakan hutan yang dilindungi dari segala bentuk ekstraksi kayu oleh masyarakat nagari. Pemanfaatan lahan selain dijadikan sebagai *rimbo larangan* dengan fungsi lindung, tetapi pada lahan masih dapat dilakukan mengambil kayu yang tertekan untuk kegunaan lain seperti pagar, atau kayu bakar.

Kontrol pada *ulayat* nagari dilakukan pada dasarnya oleh seluruh warga yang dinyatakan oleh Kelompok Petani Peduli Hutan (KPPH). Kelompok ini dibentuk oleh walinagari dengan fungsi pengawasan pada *rimbo larangan*, dimana anggotanya adalah *ninik mamak*, alim ulama, *cadiék* pandai, masyarakat dan pemuda.

Di Koto Malintang nagari mempunyai *ulayat* nagari berupa aset bagi nagari. Umumnya *ulayat* nagari juga dipakai dalam sistem pemanfaatan lahan berupa *parak* (agroforestri) seperti pada lahan-lahan *ulayat* kaum/ suku. *Ulayat* nagari berada di bawah pengaturan kerapatan adat nagari (KAN). Kepemilikan tanah ada pada nagari, sedang hak pengelolaan diberikan kepada anggota masyarakat nagari yang ditunjuk oleh KAN. Pengelolaan ini diatur melalui ketentuan yang disepakati di dalam KAN. Pada prinsipnya lahan tidak dapat dipindahtangankan, tetapi hak pengelolannya dapat diwariskan. Tanaman yang ditanam umumnya adalah kopi, selain itu juga pemegang lahan menanam jenis-jenis seperti meranti, banio, durian, manggis dan buah-buahan lain (pohon-pohon merupakan tanaman penduduk).

Kontrol dilakukan oleh masyarakat, secara khusus ada tim pengaman peraturan nagari (Perna), yang terdiri dari: Walinagari/ Kasi Kesra, KAN, Pemuda dan Kepala *Jorong*. Kasus yang terjadi diselesaikan di tingkat nagari, jika tidak diteruskan ke berwajib/ kepolisian. Tim pengaman Perna, ketua ditunjuk, yaitu Kesra, memutuskan masalah dengan jalan musyawarah.

Gambar 1. Hubungan hak-hak private dan komunal pada lahan ulayat kaum

Gambaran dari ke tiga nagari di atas menunjukkan hubungan pemegang lahan dengan lahan di bawah penguasaannya dipengaruhi oleh penguasaan yang diberikan sebagai sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan. Akibatnya hubungan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengelolaan lahan oleh pemegang lahan yang bersangkutan. Hak-hak *private* pada lahan kuat sepanjang lahan dikelola dengan baik atau ditanami dan dipelihara sesuai dengan kepentingannya. Kompleks hubungan ini dapat digambarkan pada Gambar 1.

Di Sumatera Barat dimana lahan-lahan umumnya berbentuk komunal maka status keamanan hak-hak pada lahan ini lemah (Otsuka *et al.*, 1997). Namun dalam klasifikasi penguasaan lahan ini, hubungan kekuatan ikatan antara pengelola dengan lahan ditentukan oleh tingkat manajemen pada lahan. Artinya ketika lahan dikelola dengan baik dan terus menerus maka hal ini memperkuat penguasaan pada lahan secara perorangan. Ketika lahan ditelantarkan maka kekuatan ikatan atau hak-hak perorangan pada lahan ini melemah dan digantikan oleh penguasaan secara komunal yang dikontrol oleh *penghulu-penghulu* kaum, suku atau nagari.

Dari sini dapat dikatakan walaupun status keamanan lahan-lahan komunal tetap rendah, tetapi terdapat *parak-parak* yang dikelola dengan baik (Michon *et al.*, 1986), mengindikasikan bahwa walaupun status lahan sebagai lahan komunal dengan hak-hak kepemilikan yang lemah bukan hambatan bagi keberadaan hak-hak pada pohon. Hal ini

juga dapat dilihat dari pendapat Syamsul Bahri (1983), bahwa dalam sistem hukum adat minangkabau ini hak-hak pada lahan berbeda dengan hak-hak terhadap tumbuhan dan bangunan di atasnya. Hak-hak pada pohon menurut Michon *et al* (1986) tergantung pada sifat pohon, pola produksi, orang yang menanam, dan lain-lain.

KESIMPULAN

1. Tanah ulayat kaum sebagai kepemilikan kaum mempunyai status pemanfaatan yang kuat oleh pemegang lahan, sepanjang lahan dikelola dengan baik atau ditanami dan dipelihara sesuai dengan kepentingannya. Hal ini mengarahkan lahan kepada pengelolaan agroforestri yang bersifat perorangan.
2. Pada tanah ulayat nagari, kepentingan komunal nagari mempertahankan status pemanfaatan lahan dalam bentuk agroforestri atau hutan lindung. Hal ini disebabkan oleh kuatnya hak-hak komunal pada lahan dan pohon, sehingga mampu mengarahkan pengelolaan kepada bentuk yang dapat berkelanjutan.
3. Implikasi pada kebijakan penanaman pohon pada lahan masyarakat berbasis komunal adalah untuk mendorong penanaman pohon dibutuhkan bukan penguatan status pemilikan lahan seperti misalnya sertifikasi lahan, tetapi lebih dipentingkan dukungan dalam pengelolaan lahan dan tanaman di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruce, J.W. 1998. Review of Tenure Terminology. Tenure Brief-Land Tenure Center No.1 University of Wisconsin, Madison. www.wisc.edu
- Dias, H.U. 2003. Analysis of spatial distribution of tree Resources Outside the Forest in Ashanti Region, Ghana. *Thesis* in Int. Ins. For Geo-information Science and Earth Observation Enschede, The Netherlands
- FAO, 2000. Community Forestry Rapid Appraisal of Tree and Land Tenure. FAO Corporate Document Repository. www.fao.org
- Hayami, Y dan V.W. Ruttan. 1985. *Agriculture Development: An International Perspective*. The John Hopkins Press, Baltimore and London
- MacDicken dan Vergera. 1990. *The Clasification of Agroforestri*. . In MacDicken dan N.T. Vergera (eds). 1990. *Agroforestry: Classification and Management*. Jhon Wiley and Sons, N.Y.
- Michon, G., F. Mary dan J.M. Bompard. 1986. Multistoried agroforestry garden system in West Sumatera, Indonesia. *Agroforestry Systems* Vol 4 : 315-338
- Otsuka, K, S. Suyanto, dan T.P. Tomich. 1997. Does land Tenure Insecurity Discourage Tree Planting? Evolution of Customary Land Tenure and Agroforestry Management in Sumatera. *EPTD Discussion Paper* No. 31. IFPRI, U.S.A. www.ifpri.org

- Place, F., K.Otsuka dan S. Scherr. 2004. Collective action and Property right for sustainable developmment. Property right, Collective action and Agroforestry. Focus 11 Brief 5 of 16 Pebruari 2004. Int.Food Policy Research Institute. www.ifpri.org
- _____, K. Otsuka. 1997. Population Pressure, Land Tenure and Tree Resource Management in Uganda. *EPTD Discussion Paper* No. 24. Int. Food Police Reserch Int. www.ifpri.org
- Segura-Bonilla, O. 1997. Institutional Change and Forestry in Central America. *Paper* presented at the DRUID Workshop, Copenhagen, Denmark 8-10 Januari 1997.
- Syahyuti. 2006. Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 24 No.1 Juli 2006: 14-17
- Syamsul Bahri. 1983. *Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang*. Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Andalas, 1982-1983
- Unruh Jon D. 2001. Viewpoint Poverty and property rights in the developing world: not as simple as we would like. *Land Use Policy* 19 (2002) 275-276
- Yakub, B.N. 1995. *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. CV. Pustaka Indonesia, Jakarta